



SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia - Indonesia



Kementerian Keuangan
Republik Indonesia



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Australian Government

GAMBARAN LAYANAN DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

Sumber: Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) 2022

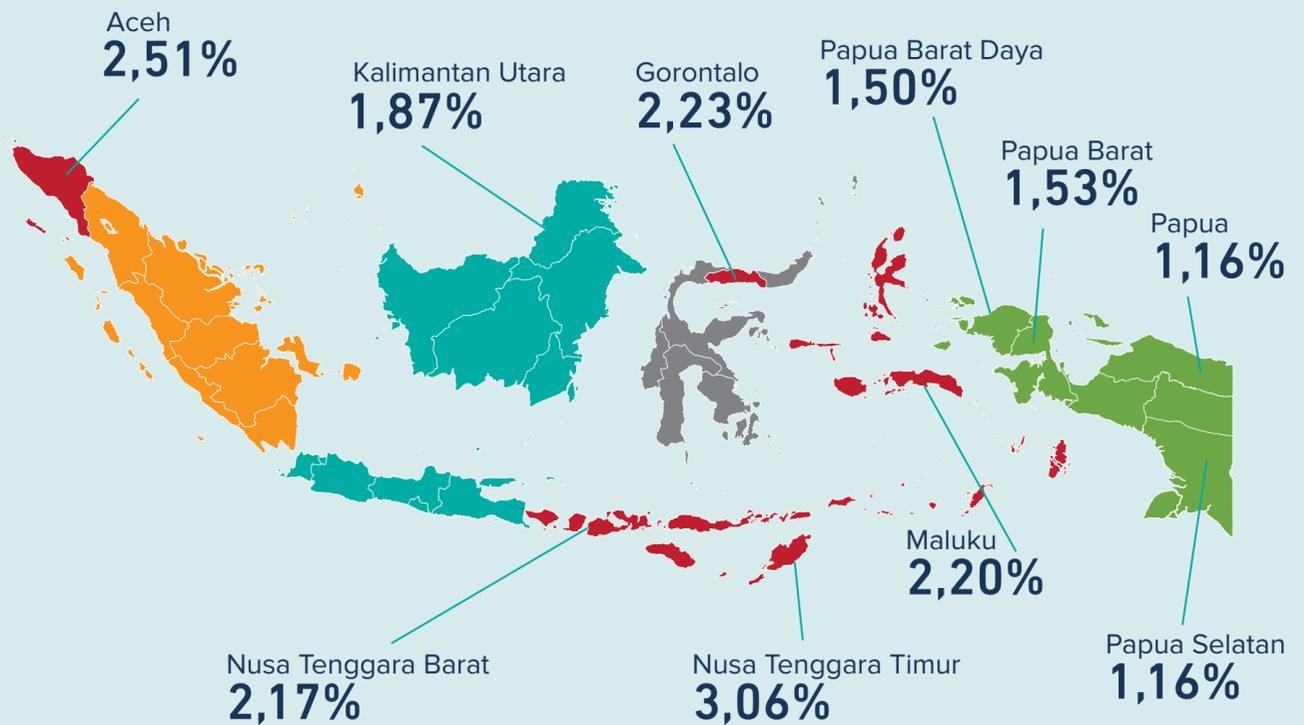




GAMBARAN UMUM

% Penyandang Disabilitas sebagai Bagian dari Populasi

Indonesia memiliki jumlah penyandang disabilitas yang besar mencapai 5 juta orang (setara dengan jumlah penduduk negara Oman)



Sumatra
1,93%

Jawa
1,80%

Bali and Nusa Tenggara
2,39%

Kalimantan
1,84%

Sulawesi
2,16%

Papua
0,95%



Hampir
5 juta

dari penduduk Indonesia
adalah penyandang
disabilitas

55%
adalah perempuan/
anak perempuan

Hampir **20%**
dari penyandang disabilitas
mengalami kesulitan mobilitas
dan gangguan penglihatan

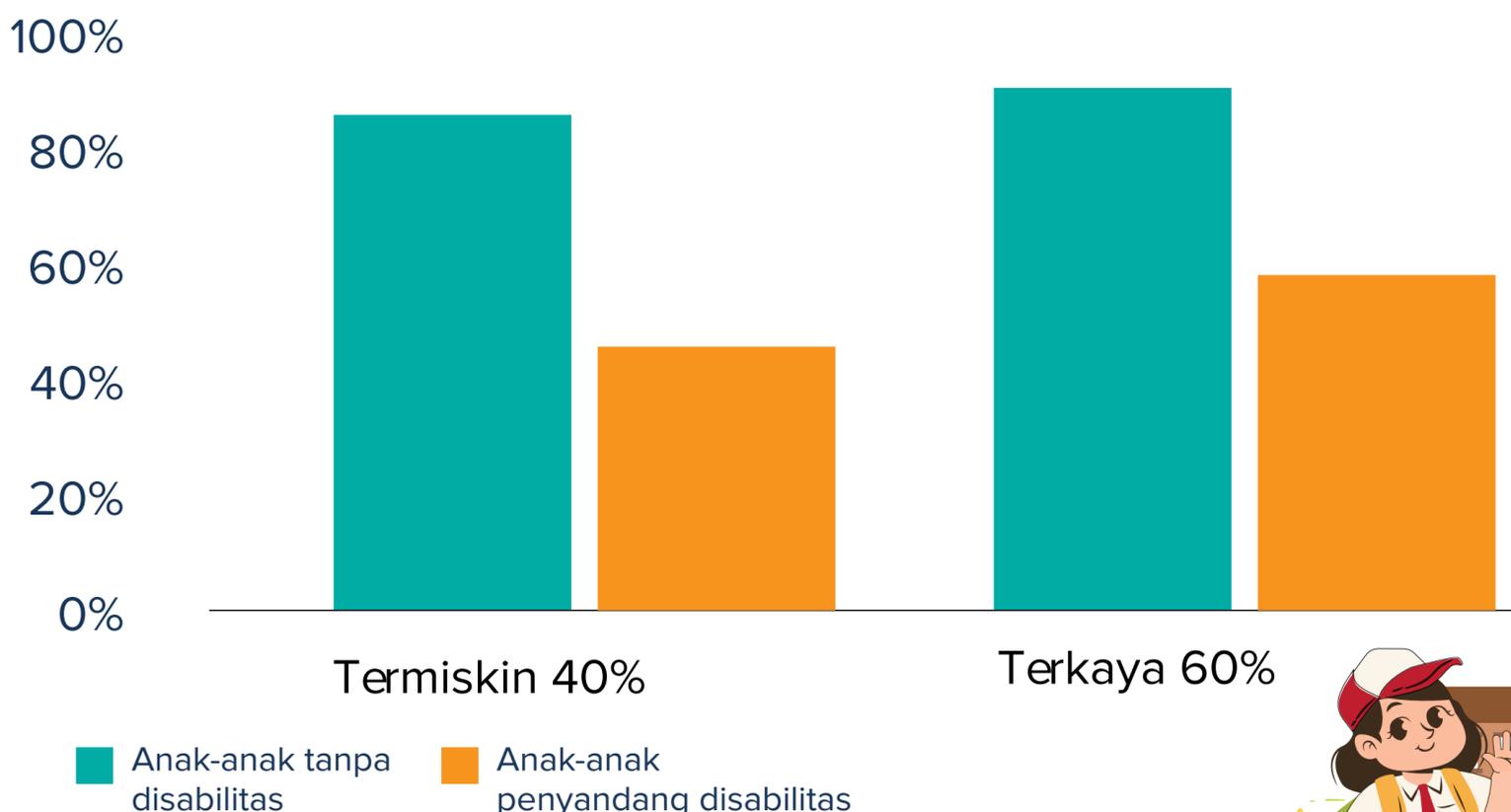
Hingga **20%**
penyandang disabilitas
termasuk dalam 10%
penduduk termiskin



AKSES PENDIDIKAN

Anak-anak penyandang disabilitas membutuhkan dukungan pendidikan yang lebih terarah

Tingkat Partisipasi di Sekolah antara Anak dengan dan tanpa Disabilitas (%)



Hingga **35%** anak-anak penyandang disabilitas belum pernah mendapatkan pendidikan formal

Terdapat hingga **205.000**

anak penyandang disabilitas di Indonesia dan 2.329 sekolah berkebutuhan khusus

Anak-anak penyandang disabilitas dari keluarga miskin memiliki kemungkinan

2,82 kali

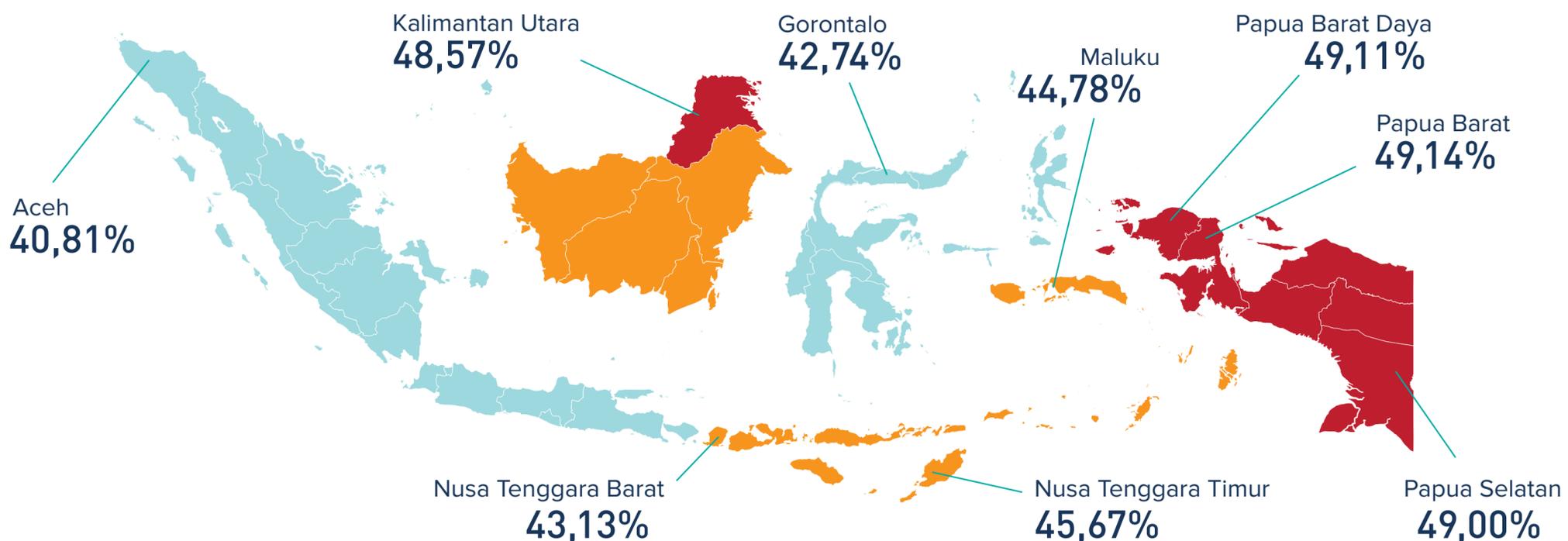
lebih besar putus sekolah dibandingkan anak-anak penyandang disabilitas dari 10% populasi terkaya



AKSES KE LAYANAN KESEHATAN

Kepemilikan akses ke Jaminan Kesehatan Nasional akan membuat penyandang disabilitas lebih terlindungi

Penduduk yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (%)



Sumatra
44,41%

Jawa
44,39%

Kalimantan
47,37%

Sulawesi
43,35%

Papua
49,32%

Hingga

55%

penyandang disabilitas yang tidak memiliki JKN adalah perempuan

50%

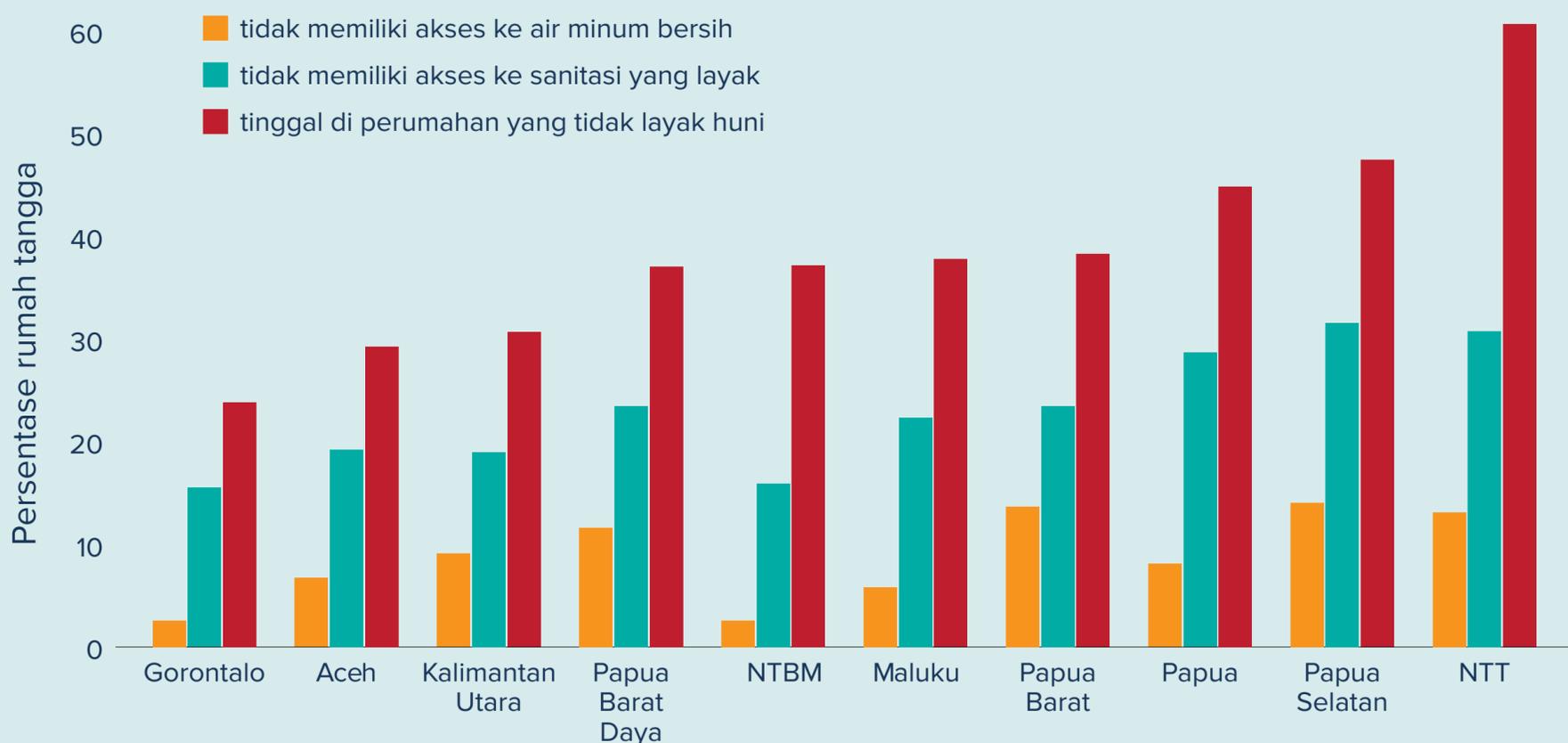
penyandang disabilitas yang tidak memiliki JKN juga memiliki penyakit kronis



AKSES KE PERUMAHAN, AIR MINUM DAN SANITASI LAYAK

Akses yang memadai terhadap infrastruktur berkualitas dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup penyandang disabilitas serta mengurangi risiko penyakit

Distribusi rumah tangga yang beranggotakan penyandang disabilitas tanpa akses ke air minum, sanitasi, dan perumahan (%)



Secara umum, dari rumah tangga yang beranggotakan penyandang disabilitas:

Hampir
7%
tidak memiliki akses ke air bersih

Hingga
20%
tidak memiliki sanitasi yang layak

Hingga
36%
tinggal di rumah yang tidak layak huni

Hingga
66%
tinggal di rumah yang tidak layak huni berada di penduduk termiskin 40%

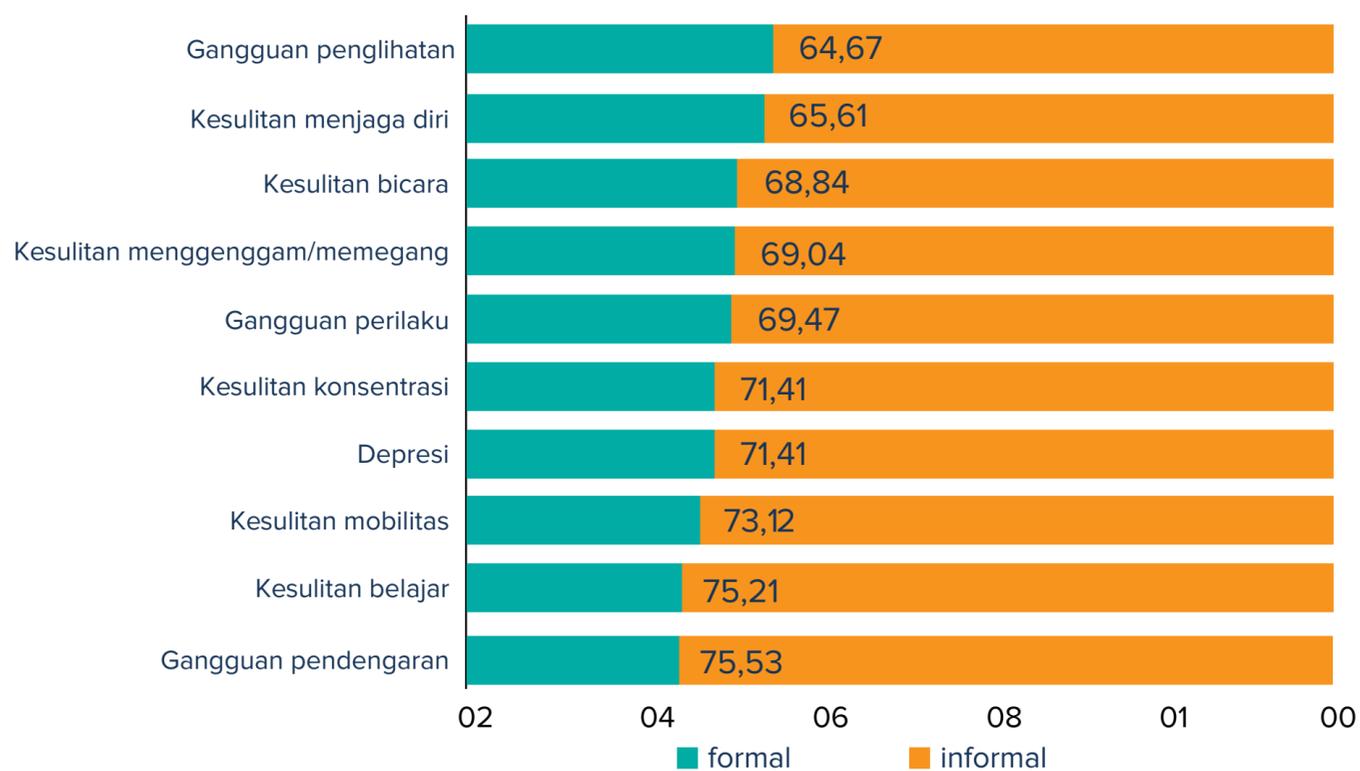




PEKERJAAN DAN EKONOMI INKLUSIF

Lingkungan kerja yang inklusif dan sadar gender perlu terus didorong demi meningkatkan kesempatan yang sama luasnya untuk penyandang disabilitas dan kelompok minoritas menuju inklusi ekonomi dan perlindungan sosial menyeluruh (*universal social protection*)

Distribusi Jenis Disabilitas dan Status Pekerjaan (%)



Hampir
70%
penyandang
disabilitas bekerja
di sektor informal



Hanya
1 dari 5
perempuan
penyandang
disabilitas yang
memiliki akses ke
pekerjaan

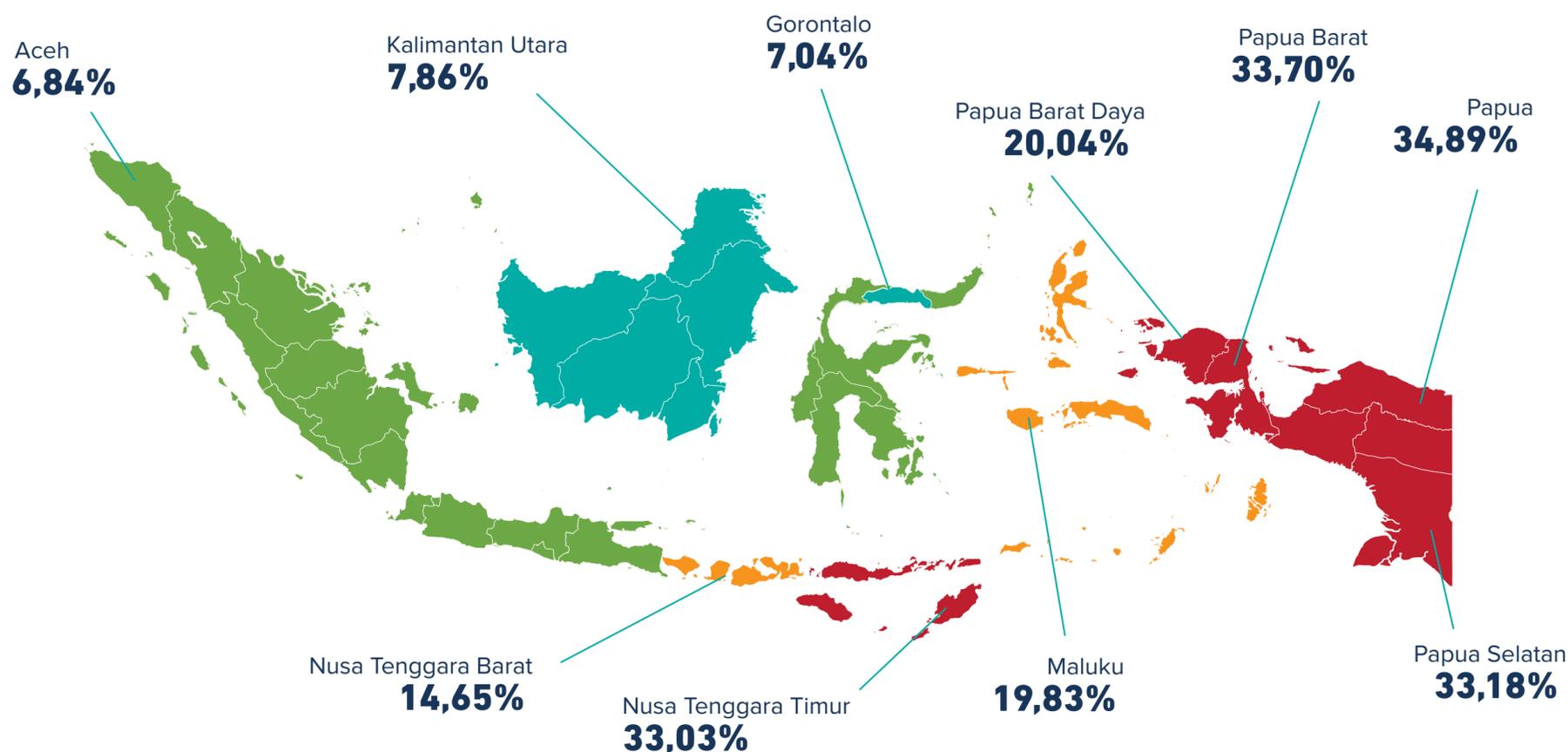
Hampir
57%
penyandang
disabilitas yang
memiliki usaha
menjalankan usaha
ultra-mikro dengan
penghasilan kurang
dari Rp 25
juta/bulan



PENCATATAN SIPIL

Peningkatan layanan pencatatan sipil dapat membantu penyandang disabilitas memperoleh dokumen penting yang akan memudahkan akses mereka terhadap layanan dasar

Anak-Anak Penyandang Disabilitas yang Tidak Memilik Akta Kelahiran (%)



Sumatra	Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Papua
11,07%	11,06%	22,25%	13,10%	10,92%	34,50%



2,41%

penyandang disabilitas tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)



12,45%

anak-anak penyandang disabilitas usia 0-17 tahun tidak memiliki akta kelahiran



MENJEMBATANI KESENJANGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Data menunjukkan pentingnya kebijakan dan infrastruktur yang tepat sasaran untuk meningkatkan akses penyandang disabilitas di Indonesia terhadap pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, sanitasi, dan pekerjaan formal. Upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan gender juga menjadi prioritas yang mendesak. Selain itu, layanan pencatatan sipil yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat dapat memperluas akses terhadap layanan dasar bagi penyandang disabilitas



Semua angka merujuk pada penyandang disabilitas sedang hingga berat. Orang dengan disabilitas sedang hingga berat mungkin mengalami tantangan seperti gangguan penglihatan atau pendengaran meskipun dengan alat bantu, tantangan bergerak atau mobilitas, kesulitan dalam menggunakan tangan atau jari, keterbatasan belajar atau intelektual, kesulitan berperilaku, gangguan bicara atau komunikasi, kebutuhan perawatan pribadi, masalah memori atau konsentrasi, dan gangguan depresi.